

BAURAN KEBIJAKAN MONETER - FISKAL TERHADAP PENCAPAIAN TARGET INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

MONETARY AND FISCAL POLICIES MIX ON ACHIEVING INFLATION TARGETING AND ECONOMIC GROWTH

Juli Panglima Saragih

(Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Nusantara I. Lt. 2,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, 10270, Indonesia,
email: saragihjulipanglima@yahoo.co.id

Naskah diterima: 17 Maret 2015, direvisi: 3 Juni 2015,
disetujui: 26 Juni 2015

Revisi I: 25 Juni 2015; Revisi II: 4 Agustus 2015

Abstract

As main macroeconomic policies, monetary and fiscal policies give influences to economic activities on the whole. One of the monetary economic policies is aimed to reach inflation target which can be realized by the Central Bank by applying interest rate approach in order to control money supply. Meanwhile, fiscal policy is planned to achieve economic growth by emphasizing fiscal role in government spending. The writer argues that both macro-economic policies must be synchronized and integrated so that they can meet the main goal to reach both targets above. This essay is a descriptive analysis using secondary data applying a qualitative approach. The writer came to conclusion that a stable integration of monetary and fiscal policies can effectively help Indonesia reach its inflation and growth targets simultaneously.

Key words: *monetary policy, fiscal policy, monetary-fiscal policies, inflation target, economic growth, Indonesia.*

Abstrak

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua kebijakan ekonomi utama dalam perekonomian dan mempengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter terkait dengan upaya bank sentral —sebagai otoritas moneter untuk mencapai target inflasi (*inflation targeting*). Salah satunya adalah dengan mengelola uang beredar (M1 dan M2) di masyarakat melalui kebijakan suku bunga perbankan (*BI-Rate*). Sedangkan kebijakan fiskal terkait dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui peran fiskal dalam belanja pemerintah (*government expenses*). Kedua kebijakan tersebut harus sejalan atau sinkron agar target inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis yakni mengkaji bauran antara kebijakan moneter-fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menganalisa data sekunder yang relevan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa, kebijakan moneter—fiskal sama sama penting dalam pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kedua kebijakan tersebut yang harus sinkron tidak saling melemahkan satu sama lain.

Kata kunci: kebijakan moneter, kebijakan fiskal, moneter-fiskal, target inflasi, pertumbuhan ekonomi, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia, tidak terlepas dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang ditempuh negara bersangkutan. Dalam praktek, hampir semua negara di dunia menerapkan kedua kebijakan tersebut Tetapi kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh berbeda-beda antar-negara bergantung kepada kondisi ekonomi riil dan arah serta tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Di Indonesia, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang

ditempuh oleh Bank Indonesia (BI)—sebagai bank sentral yang independen. Oleh sebab itu, BI memegang kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan moneter (*monetary policy*) yang sering disebut dengan otoritas moneter. Dalam sistem perekonomian Indonesia terbuka, kebijakan moneter menjadi bagian dari kebijakan ekonomi makro yang di dalamnya juga termasuk kebijakan fiskal (*fiscal policy*).

Salah satu instrumen kebijakan moneter yang dijalankan bank sentral adalah pengelolaan atau manajemen uang beredar (*money supply*), di samping instrumen lain seperti kebijakan suku bunga

perbankan (*BI-Rate*). Pengelolaan kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi dengan cara mengelola/mengatur peredaran uang dan suku bunga yang dapat cenderung semakin bertambah di masyarakat. Dalam konteks kegiatan perekonomian Indonesia, inflasi tidak dapat dihindari. Inflasi yang semakin meningkat harus dapat diatasi dengan berbagai kebijakan salah satunya adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI serta kebijakan fiskal melalui anggaran negara. Kenaikan inflasi 1% saja sudah mengkhawatirkan dan membuat nilai (harga) uang menjadi turun. Apabila terjadi inflasi yang sangat tinggi, maka semakin menurunkan nilai uang dan daya beli masyarakat karena masyarakat harus menambah nominal uang untuk mendapatkan satu jenis barang dan/atau jasa yang sama.

Apabila masyarakat menambah uang untuk membeli satu jenis barang/jasa yang sama karena harga meningkat, maka hal ini mengindikasikan daya beli (*purchasing power*) masyarakat turun. Dampaknya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, karena nilai uang menjadi berkurang karena inflasi. Kondisi di mana daya beli masyarakat yang semakin turun jelas merupakan masalah dalam perekonomian. Apabila tidak dimbangi dengan peningkatan pendapatan (*income*) seperti upah pekerja atau upah minimum provinsi (UMP) maka sudah dipastikan kesejahteraan masyarakat akan turun. Inflasi—sampai saat ini menjadi sasaran utama kebijakan moneter BI. Inilah salah satu tujuan dari kebijakan moneter BI yakni mengendalikan laju inflasi setiap saat agar tetap stabil atau semakin turun. Dalam literatur, penurunan inflasi sering disebut dengan *deflasi*.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi, Bank Indonesia menganut dan menerapkan sebuah kerangka kerja yang dinamakan Kerangka Kerja Target Inflasi (*Inflation Targeting Framework*). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak bulan Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi atau target inflasi kepada publik dan kebijakan moneter yang diambil yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking*, artinya perubahan *stance* kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.

Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga BI (*BI-Rate*) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang (SBPU), suku bunga deposito atau simpanan (SBS), dan suku bunga kredit perbankan (SBK). Perubahan suku bunga di atas pada akhirnya akan memengaruhi *output* (produksi) barang/jasa dan inflasi.¹ Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan menstabilkan nilai rupiah terhadap dolar AS ini diatur dalam Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005—sebagaimana yang disebutkan di atas, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating system*). Peran dari stabilisasi nilai tukar rupiah ini sangat penting dalam mencapai stabilitas harga barang/jasa dan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebihan terhadap dolar AS. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah bertujuan tidak untuk mengarahkan nilai tukar rupiah pada level tertentu tetapi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah setiap saat untuk menjaga target inflasi.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter adalah menjaga laju inflasi yang ditetapkan pemerintah melalui target inflasi dalam kebijakan fiskal APBN. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter bank sentral khususnya inflasi, menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing (*foreign currency*), penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum (CWM), dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah pada industri perbankan.

Setiap tahun inflasi selalu ditargetkan pemerintah dalam kebijakan fiskal (APBN), tetapi instrumen pengendalian inflasi sebagian besar dilakukan melalui kebijakan moneter oleh BI. Oleh karena itu, kebijakan fiskal sangat berkepentingan dengan inflasi. Dari sisi kebijakan publik, BI bertanggungjawab kepada publik dalam mencapai

¹ Bank Indonesia, Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx>, diakses 7 Januari 2015).

target inflasi (*inflation targeting*) setiap tahun yang sudah ditetapkan dalam kebijakan fiskal pemerintah dalam anggaran negara (APBN). Dalam konteks ekonomi makro, fundamental ekonomi penting lainnya adalah kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal pemerintah antara lain bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB). Pencapaian pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dilaksanakan secara paralel. Optimalisasi kedua kebijakan tersebut sangat penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal pemerintah dalam beberapa tahun ditetapkan dengan ekspansif dengan deficit anggaran. Kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa didukung dengan kebijakan moneter yang juga ekspansif, tidak akan melahirkan pertumbuhan ekonomi (PDB) yang tinggi.

Pengetatan jumlah uang beredar misalnya, seperti peredaran uang M1 dan M2² akan berkontradiksi dengan kebijakan fiskal yang ekspansif. Karena kebijakan fiskal yang ekspansif ditandai dengan kecenderungan semakin meningkatnya jumlah uang yang beredar termasuk *e-money*. Ciri ciri kebijakan fiskal ekspansif adalah defisit anggaran di mana sumber pembiayaan deficit dapat berasal dari sumber finansial dalam negeri baik industri perbankan, industri jasa asuransi, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) maupun sumber pinjaman luar negeri (utang). Tujuannya adalah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan/ditargetkan. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi butuh modal atau investasi yang besar baik investasi sektor swasta, kredit perbankan, belanja pemerintah (*government expenses*) dalam APBN, maupun investasi portofolio di pasar modal. Semakin meningkat aliran modal untuk mendanai pembangunan maka berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang ekspansif juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi anggaran belanja pemerintah dalam APBN.³ Kebijakan fiskal

yang dilaksanakan dalam bentuk operasional fiskal sehari-hari selalu terkait dengan upaya pencapaian sasaran dan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit perbankan akan mendorong kegiatan pembangunan yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Kebijakan perkreditan di sektor perbankan merupakan otoritas moneter BI dalam kaitan mendukung pembiayaan proyek pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun kebijakan perkreditan perbankan tersebut tidak terlepas dengan upaya pemerintah dalam konteks operasional fiskal yang juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pengetatan kredit perbankan dengan tujuan untuk meredam laju inflasi cenderung akan berkontraksi terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebab kredit perbankan masih menjadi salah satu sumber finansial utama dalam membiayai pembangunan di Indonesia, baik kredit perbankan BUMN maupun bank swasta nasional. Apabila pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka optimalisasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus ditempuh. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga harus didukung oleh kebijakan moneter agar target pertumbuhan ekonomi tercapai dan berkualitas dengan semakin berkurangnya angka pengangguran.

Ketika pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi otoritas moneter bank sentral menerapkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) untuk mengendalikan inflasi dengan membatasi kredit perbankan—maka hal ini kontradiksi dengan kebijakan fiskal yang ekspansif. Sebab pertumbuhan investasi masyarakat bersumber antara lain dari modal kredit perbankan untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian. Tetapi dalam menerapkan kebijakan moneter, BI juga harus memperhatikan kebijakan suku bunga kredit perbankan yang mendukung perekonomian.

Apabila BI menerapkan kebijakan suku bunga pinjaman perbankan yang tinggi, maka biaya modal yang harus dikeluarkan masyarakat cenderung menjadi lebih besar. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya produksi (*production cost*) barang dan/atau jasa karena modal merupakan salah satu faktor produksi penting dalam kegiatan ekonomi. Kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh mahalnya biaya modal (*cost of money*), maka berdampak pada harga pokok produksi (HPP) barang yang juga akan cenderung naik. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan harga jual barang juga menjadi

² M1 adalah uang beredar dalam arti sempit yaitu uang kartal dan uang giral. Sedangkan M2 adalah uang beredar dalam arti luas meliputi uang kartal, uang giral dan uang kuasi. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah. Uang giral adalah simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang terdiri atas rekening giro, kiriman uang (transfer), dan kewajiban segera lainnya antara lain simpanan berjangka yang telah jatuh waktu (tempo).

³ Jumlah nominal PDB dari sisi pengeluaran salah satunya adalah melalui pengeluaran (belanja) pemerintah dalam APBN. Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB selama ini rata-rata 8-9%. Apabila pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif serta mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal, maka diharapkan kontribusi pengeluaran pemerintah menjadi 10% terhadap PDB.

meningkat. Implikasi selanjutnya adalah peningkatan laju inflasi. Dengan demikian kebijakan moneter dan fiskal harus tetap terkoordinasi untuk mendukung kegiatan perekonomian khususnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjaga laju inflasi.

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan singkat di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah tidak adanya koordinasi atau bauran kebijakan antara fiskal dan moneter akan berdampak kurang baik terhadap perekonomian yang ditandai dengan relatif tingginya tingkat inflasi yang secara langsung juga dapat menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi (PDB).

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bauran kebijakan fiskal—moneter dalam kaitan untuk mencapai target inflasi (*inflation targeting*) dan pertumbuhan ekonomi (PDB) yang direncanakan. Kedua sasaran tersebut di atas menjadi inti dari operasional dan implementasi kebijakan moneter—fiskal tersebut di atas sekaligus dan saling mendukung satu sama lain. Diharapkan dengan menganalisa kedua kebijakan tersebut dan mengkaji penerapannya di dalam praktis, maka pengendalian laju inflasi yang rendah dan target pertumbuhan ekonomi (PDB) tinggi dapat tercapai sekaligus secara bersamaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Definisi Inflasi

Inflasi atau *inflation* dapat diartikan sebagai kenaikan dari harga barang dan/atau jasa yang terjadi secara terus menerus, memengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah⁴ dimana meningkatnya harga-harga tersebut terjadi secara umum.⁵ Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut *deflasi*.⁶

Inflasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses ketidakseimbangan (*disequilibrium*) yang mana tingkat harga yang terus menerus mengalami

peningkatan selama periode tertentu.⁷ Kenaikan harga-harga yang menjadi penyebab terjadinya inflasi dapat diklasifikasikan dan jika harga-harga naik secara perlahan-lahan maka inflasi yang terjadi disebut sebagai "*Creeping Inflation*". Jika harga-harga meningkatnya secara cepat maka kondisi tersebut disebut sebagai "*Hyperinflation*"⁸ atau inflasi yang melebihi 50 persen per bulan atau lebih dari 1 persen per hari.⁹

Inflasi secara umum menggunakan indikator yang disebut dengan istilah *Consumer Price Index* (CPI) atau Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK ini menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Di Indonesia, IHK ini diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Biasanya BPS memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota baik pasar tradisional maupun modern. Berdasarkan perhitungan BPS, inflasi yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran berdasarkan the classification of individual consumption by purpose (COICOP) yaitu: 1) Kelompok Bahan Makanan; 2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau; 3) Kelompok Perumahan; 4) Kelompok Sandang; 5) Kelompok Kesehatan; 6) Kelompok Pendidikan dan Olah Raga; dan 7) Kelompok Transportasi dan Komunikasi.¹⁰

BPS juga telah mengkaji bahwa terdapat 8 jenis kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terhadap inflasi. (lihat tabel 1). Sedangkan perkembangan laju inflasi bulanan sepanjang tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2. Komponen inflasi terdiri dari inflasi inti, komponen harga bergejolak, dan komponen harga diatur pemerintah. Inflasi yang stabil atau rendah tergantung pada ketiga komponen tersebut. Inflasi yang tinggi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan daya saing ekonomi.¹¹

Dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintah sehari-hari, inflasi juga dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni: **1) Inflasi inti; dan 2) Inflasi non-inti**. Kedua kategori atau pengelompokan ini disebut dengan disgregasi Inflasi (*disaggregation of inflation*). Yang dimaksud disgregasi inflasi adalah cara yang dilakukan untuk menghasilkan

⁴ Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan Buku 1 Edisi 8*, terjemahan oleh Lana Soelistianingsih & Beta Yulianita G., Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm. 13.

⁵ Bank Indonesia, *Pengenalan Inflasi, Pentingnya Kestabilan Harga*, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Pentingnya.aspx>, diakses 17 Februari 2015).

⁶ *Ibid.*

⁷ Mulia Nasution, *Ekonomi Moneter: Uang dan Bank*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 207-208.

⁸ *Ibid.*, hlm. 207.

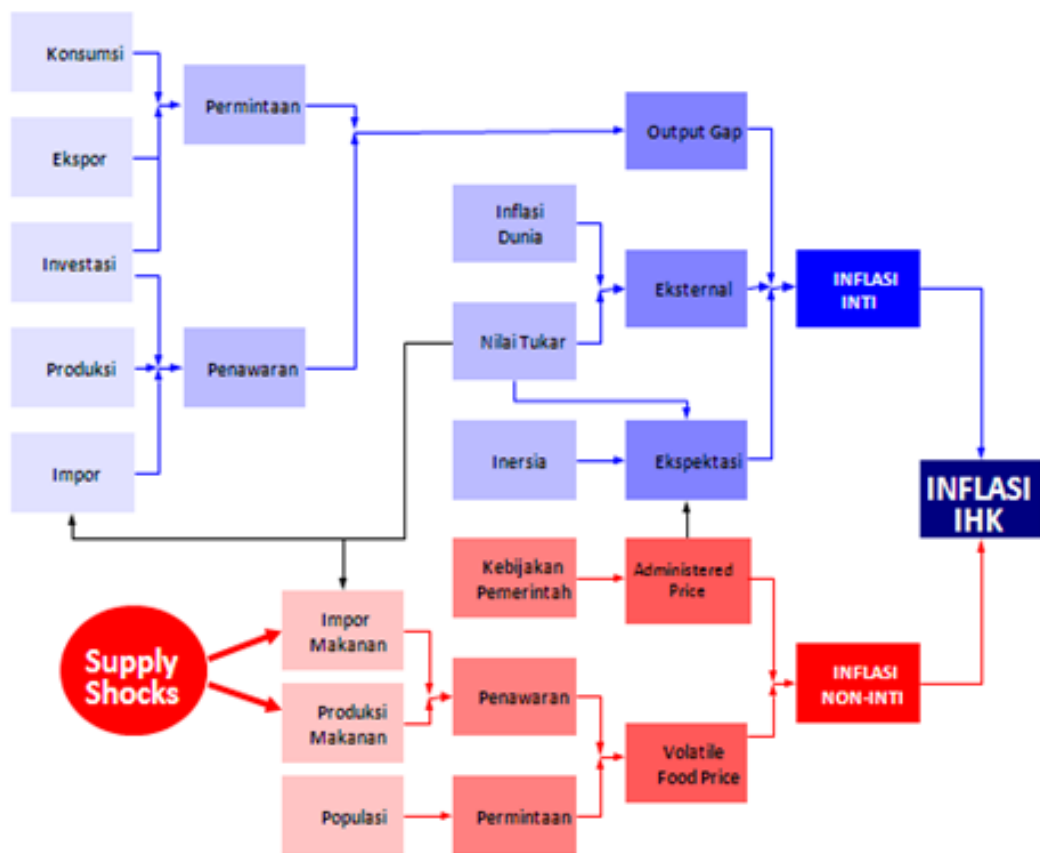
⁹ N. Gregory Mankiw. *Makroekonomi Edisi Keenam*, terjemahan oleh Fitriya Liza & Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 100.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ BPS, 2013, *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2013*, Jakarta: BPS, hlm. 53.

suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.¹² Yang dimaksud dengan **inflasi inti** adalah komponen inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan, penawaran, nilai tukar rupiah, dan harga komoditi internasional, setelah mengeluarkan kelompok bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi dan barang-barang yang harganya ditentukan oleh pemerintah (*administered prices*). Sedangkan **inflasi non-inti** adalah inflasi yang ditentukan oleh komponen harga barang yang bergejolak dan harga barang yang ditentukan oleh pemerintah.¹³ Di bawah ini digambarkan tentang komponen inflasi inti dan inflasi non-inti.

supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output riil* yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada



Sumber: <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Disagregasi>, diakses tgl 17 Februari 2015.

Gambar 1. Komponen Inflasi Inti dan Inflasi Non-Inti.

2. Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative*

saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR)—sekarang upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 45.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bank Indonesia, Pengenalan Inflasi, Disagregasi Inflasi, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Disagregasi.aspx>, diakses 17 Februari 2015).

Inflasi dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu: 1) Inflasi Inti (*core inflation*) yakni inflasi dari sejumlah komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, keseimbangan permintaan-penawaran yang sifatnya cenderung permanen, persistent dan bersifat umum. Terdapat 751 jenis komoditas yang mempengaruhi pergerakan inflasi inti. 2) Inflasi yang harganya diatur pemerintah. Terdapat 23 komoditas yang harganya diatur/ditentukan oleh pemerintah seperti harga BBM, tariff dasar listrik (TDL), harga pupuk, cukai rokok, dan lain-lain. 3) Inflasi bergejolak (*volatile foods*), yakni inflasi yang disebabkan oleh perkembangan harga sejumlah barang yang cenderung mudah bergejolak di pasar seperti harga pangan. Terdapat sebanyak 85 komoditas yang dapat mempengaruhi inflasi bergejolak tersebut.¹⁵

3. Konsep Kebijakan Moneter

Pasal 10 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan: “*Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), Bank Indonesia berwenang: a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi; b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2) penetapan tingkat diskonto; 3) penetapan cadangan wajib minimum (CWM); 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.*”

Berdasarkan pasal di atas, sasaran-sasaran moneter yang ditetapkan oleh BI adalah dalam rangka menjaga sasaran atau target inflasi. Sejak bulan Juli 2005, BI menyempurnakan kebijakan pengendalian inflasi dengan prinsip *Inflation Targeting Framework (ITF)*. Artinya kebijakan moneter tidak dilaksanakan secara kaku melainkan juga mempertimbangkan sasaran-sasaran pembangunan yang lebih luas antara lain sasaran pertumbuhan ekonomi (PDB) dalam kebijakan fiskal pemerintah. Berbeda dengan prinsip *full discretionary*, prinsip *inflation targeting framework* menuntut agar *discretionary policy* dalam pelaksanaan kebijakan moneter bersifat terbatas.¹⁶

¹⁵ Badan Pusat Statistik, (tanpa tahun), Data Sosial Ekonomi: *Laporan Bulanan BPS, Maret 2015*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm.155-156.

¹⁶ Bambang Prijambodo, “Evaluasi Implementasi Langkah-Langkah Penguatan Kebijakan Moneter Dengan Sasaran Akhir Kestabilan Harga”, Makalah Disampaikan pada *Round Table Discussion* tentang Evaluasi Implementasi *Inflation Targeting Framework*, Bank Indonesia, Jakarta, 28 Juni 2006.

Elemen-elemen pokok kebijakan moneter BI antara lain adalah: *pertama*, suku bunga (BI-Rate) digunakan sebagai sasaran operasional moneter menggantikan uang beredar. Perubahan sasaran operasional moneter ini didasarkan pada pertimbangan makin lemahnya hubungan antara uang beredar dengan laju inflasi. Artinya dengan tingkat suku bunga bank yang relatif tinggi, maka diharapkan jumlah uang beredar akan berkurang karena kecenderungan masyarakat untuk menyimpan atau menabung di bank akan bertambah.

Kedua, kebijakan moneter diperkuat dengan strategi *pre-emptive* atau *forward looking* mengingat inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masyarakat yang bersifat adaptif atau penyesuaian. Oleh karena itu kebijakan moneter perlu konsisten terhadap sasaran akhir yang akan dicapai atau menghindari *time-inconsistency policy*. Tanpa konsistensi yang kuat, kebijakan moneter yang ditempuh BI ke depan diprediksi kurang mendapat perhatian dari masyarakat. *Ketiga*, pelaksanaan *inflation targeting framework*, membutuhkan komunikasi yang efektif dan transparan kepada masyarakat luas agar kebijakan moneter yang ditempuh benar-benar dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Keempat, koordinasi antara bank sentral (otoritas moneter) dengan pemerintah (otoritas fiskal) dalam rangka mencapai target inflasi yang ditetapkan pemerintah. Karena faktor-faktor pendorong inflasi tidak seluruhnya berada pada kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, tetapi ada fungsi pemerintah dalam menjaga inflasi melalui instrumen kebijakan fiskal. Sebagaimana diketahui tiga fungsi pokok anggaran (fiskal) terdiri dari 1) fungsi distribusi pendapatan; 2) fungsi stabilisasi ekonomi dan 3) fungsi alokasi sumber daya.¹⁷ Ketiga fungsi fiskal ini selalu berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan moneter, seperti pengendalian inflasi.

4. Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Kerangka operasional kebijakan moneter merupakan suatu perencanaan kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar, khususnya M1 dan M2 di masyarakat yang ditujukan untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter yaitu stabilitas harga barang/jasa dan inflasi. Dalam setiap kebijakan moneter, Bank Indonesia selalu menetapkan sasaran operasionalnya, dan beberapa instrumen yang dipergunakan untuk mempengaruhi sasaran operasional tersebut. Saat ini BI masih menggunakan uang primer (M0) sebagai sasaran operasional moneter. Sedangkan instrumen moneter yang digunakan adalah (1) operasi pasar terbuka;

¹⁷ *Ibid.*, hlm.1-2.

(2) fasilitas diskonto; (3) giro wajib minimum dan imbauan.¹⁸ (lihat gambar di bawah).

sisi penawaran (seluruh sektor ekonomi). Dengan pemantauan variabel-variabel tersebut diharapkan



Sumber: Perry Warjiyo dan Solikin, "Kebijakan Moneter di Indonesia", Penerbit Bank Indonesia, Jakarta.

Gambar 2. Kerangka Operasional Kebijakan Moneter: Tujuan Akhir Kestabilan Harga/Inflasi

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa, dengan pengendalian jumlah uang primer (M0) sebagai sasaran operasional moneter, maka jumlah uang beredar di masyarakat (M1 dan M2) dapat dipengaruhi agar sejalan dengan sasaran akhir dari kebijakan moneter yakni stabilnya harga barang/jasa. Dengan stabilnya harga barang/jasa maka inflasi juga dapat dikendalikan dan target inflasi dapat tercapai.¹⁹ Kebijakan moneter di atas perlu juga didukung kebijakan fiskal dan diupayakan tidak saling melemahkan sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan normal.

Kebijakan BI-Rate merupakan kebijakan suku bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai cermin dari kebijakan moneter BI dan diumumkan kepada publik. BI-Rate merupakan suku bunga sinyaling dalam rangka pencapaian sasaran inflasi jangka menengah dan jangka panjang melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang (Sertifikat Bank Indonesia dan Pasar Uang Antar-Bank) yang diumumkan oleh BI secara periodic untuk jangka waktu tertentu. Dalam rangka implementasi penyempurnaan kerangka operasional kebijakan moneter BI, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2008 bank sentral melakukan perubahan sasaran operasional suku bunga SBI 1 bulan menjadi suku bunga Pasar Uang Antar-Bank *Overnight*. BI-Rate diimplementasikan dalam operasi moneter BI melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan keseimbangan eksternal serta untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.²⁰

Dalam mencapai sasaran akhir laju inflasi, secara periodik Bank Indonesia memantau perkembangan berbagai variabel ekonomi riil, moneter, dan keuangan untuk meyakinkan bahwa sasaran inflasi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pemantauan terhadap variabel ekonomi riil dilakukan baik dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, ekspor-impor swasta dan ekspor-impor pemerintah, dan dari

dapat diketahui seara dini kemungkinan tekanan terhadap inflasi ke depan.²¹

5. Konsep Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal—sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro bertujuan mencapai berbagai sasaran pembangunan di berbagai sektor. Terdapat 3 (tiga) fungsi utama kebijakan fiskal (anggaran Negara) yaitu: *pertama*, fungsi alokasi anggaran; *kedua*, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi; dan *ketiga*, fungsi stabilisasi ekonomi-makro. Fungsi alokasi anggaran Negara bertujuan mendanai pembangunan di berbagai bidang. Fungsi distribusi dan subsidi anggaran adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi ekonomi makro bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui upaya meredam siklus-bisnis atau fluktuasi ekonomi atau yang bersifat kontra-siklis (*counter-cyclical*). Yang dimaksud dengan *counter-cyclical* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah bahwa dalam kondisi perekonomian lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat autonomous, termasuk belanja barang dan/jasa serta belanja modal (*capital expenses*) dapat memberi stimulus terhadap perekonomian untuk tumbuh tinggi.²²

Sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang cenderung memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, instrumen kebijakan fiskal dapat didayagunakan untuk meredam dan mendinginkan roda kegiatan ekonomi dengan cara menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber ekonomi melalui dampak kontraksi APBN. Dalam situasi ini, operasi fiskal cenderung tidak ekspansif atau bersifat kontraksi dengan mengurangi laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah dalam anggaran negara. Fungsi strategis anggaran Negara sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian dapat diketahui dari dampak langsung maupun tidak langsung terhadap sektor ekonomi lainnya seperti sektor moneter, sektor riil, dan

¹⁸ Perry Warjiyo & Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jakarta: BI, 2003, hlm. 46-47.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ BPS, *Loc.,cit.*, hlm. 86.

²¹ Perry Warjiyo & Solikin, *Op.cit.*, hlm. 43.

²² Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2012*, hlm. 1-6.

sektor eksternal.²³ Kebalikan dari anggaran Negara kontraktif adalah anggaran yang ekspansif.

Dalam menjelaskan korelasi kebijakan fiskal pemerintah terhadap perekonomian khususnya pertumbuhan ekonomi, beberapa ahli ekonomi seperti Samuelson, menjelaskan beberapa fungsi utama pemerintah: 1) meningkatkan efisiensi; 2) menciptakan keadilan; 3) kebijakan stabilisasi guna menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar (*market failure*) demi tercapainya efisiensi; 4) memperjuangkan atau mengupayakan pemerataan melalui program perpajakan dan re-distribusi pendapatan untuk kelompok masyarakat tertentu.²⁴ Sedangkan Jones mengemukakan, bahwa peran pemerintah dalam perekonomian terbagi dalam dua yakni peran langsung dan tidak langsung. Peran langsung yakni mengendalikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal. Peran tidak langsung adalah berkaitan dengan masalah inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar.²⁵

6. Determinan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (PDB) dapat dihitung berdasarkan aktivitas sektor usaha atau lapangan usaha. Berdasarkan perhitungan BPS, terdapat 9 sektor usaha yang menentukan pertumbuhan ekonomi yakni pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; penangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diketahui dari aspek pengeluaran, yakni konsumsi rumah tangga/ konsumsi masyarakat; investasi swasta; pengeluaran pemerintah; dan ekspor-impor. Dari sisi sektor usaha dan sisi pengeluaran tersebut maka akan diketahui nominal PDB setiap tahun. Terdapat dua dasar perhitungan PDB yakni berdasarkan harga konstan (*at bconstant price*) dan harga berlaku (*at current price*). PDB berdasarkan harga berlaku lebih besar dibandingkan atas dasar harga konstan.

Formula Pertumbuhan Ekonomi (PDB):²⁶

$$\text{PDB Growth} = \frac{(\text{PDB} - \text{PDB})}{\text{PDB}} \times 100\%$$

7. Bauran Kebijakan Moneter—Fiskal

Untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan ekonomi makro secara optimal, biasanya diterapkan suatu kebijakan campuran (*policy-mix*) yang terkoordinasi dengan baik antara kebijakan moneter dengan fiskal (*monetary—fiscal policy mix*). Secara konseptual, koordinasi bauran kebijakan moneter—fiskal dapat dilakukan melalui beberapa skenario yakni: 1) kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan fiskal ekspansif; 2) kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif; 3) kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif; 4) kebijakan moneter dan fiskal kontraktif.²⁷

Apabila bauran kebijakan moneter—fiskal terkoordinasi baik, maka skenario bauran kebijakan 1) merupakan skenario kebijakan yang paling efektif diterapkan untuk tujuan kebijakan ekonomi makro yang bersifat *counter-cyclical* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil. Oleh karena itu, dalam penetapan kebijakan fiskal anggaran Negara, penetapan target inflasi menjadi penting sebagai salah satu asumsi ekonomi makro. Target inflasi yang ditetapkan dalam anggaran negara mutlak didukung oleh instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia.

Artinya dalam situasi perekonomian mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan maka bauran kebijakan moneter—fiskal harus sama-sama ekspansif dan dikoordinasikan sangat tepat dan baik untuk mendorong kegiatan perekonomian dengan pengaruh yang moderat dan fleksibel terhadap pergerakan suku bunga.²⁸ Artinya pergerakan suku bunga (*interest rate*) diatur sangat fleksibel sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang berkembang. Apabila suku bunga terlalu tinggi maka kecenderungan melakukan investasi akan lemah khususnya di sektor riil (sektor industri dan perdagangan). Sebaliknya apabila suku bunga terlalu rendah maka masyarakat justru menunda menabung uangnya di perbankan dan kecenderungan untuk berinvestasi semakin besar.

Sedangkan bauran kebijakan moneter—fiskal yang sama-sama kontraktif sangat bermanfaat bagi upaya untuk mengurangi laju atau ekspansi kegiatan ekonomi yang berlebihan (*over-heating economy*). Biasanya skenario kebijakan moneter—fiskal kontraktif bertujuan untuk meredam laju

²³ *Ibid.*

²⁴ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, Cetakan Pertama, Jakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.180.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu Negara tertentu. Atau merupakan jumlah nilai (produk) akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun tertentu.

²⁷ Perry Warjiyo & Solikin, *Op.cit.*, hlm.6-7.

²⁸ *Ibid.*

inflasi yang cenderung terus meningkat. Sedangkan skenario 2) dan skenario 3) merupakan dua skenario yang saling meniadakan atau memperlemah satu sama lain dan hasil dari kedua kebijakan tersebut bergantung kepada kekuatan pengaruh dari masing-masing kebijakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Skenario 2) dengan bauran kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif justru saling meniadakan satu sama lain dan mendorong peningkatan suku bunga sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan investasi (tabungan) masyarakat dan sektor swasta. Dengan semakin lesunya kegiatan investasi (tabungan) masyarakat dan swasta, akibat peningkatan suku bunga maka sulit diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Skenario 2) ini cenderung akan mendorong investasi sektor pemerintah melalui anggaran Negara yang ekspansif dan terus meningkat.²⁹ Keempat skenario bauran kebijakan moneter—fiskal di atas dapat dilihat dalam gambar di bawah.

	Kebijakan Fiskal	
Kebijakan Moneter	1) Ekspansif	2) Ekspansif
	3) Ekspansif	4) Kontraktif
	Kontraktif	Kontraktif

Sumber: Perry Warjiyo dan Solikin, "Kebijakan Moneter di Indonesia", Penerbit Bank Indonesia, Jakarta, dan dari berbagai sumber.

Gambar 3. Bauran Kebijakan Moneter—Fiskal (*monetary-fiscal mix policies*) Dalam Kegiatan Ekonomi.

Secara teoritis, terdapat 4 (empat) pilihan bauran kebijakan moneter dan fiskal, yaitu: **(i) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter longgar;** **(ii) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter ketat;** **(iii) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter longgar;** dan **(iv) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter ketat.** Masing-masing otoritas memiliki dua pilihan kebijakan, yaitu: kebijakan ketat maupun kebijakan longgar (*a tight policy or a loose policy*). Ketika keduanya bersama-sama memilih kebijakan pengetatan, maka tingkat inflasi cenderung rendah dan jumlah lapangan kerja juga rendah (pengangguran tinggi). Sedangkan ketika kedua otoritas kebijakan memutuskan untuk bersama-sama membuat kebijakan yang longgar, maka tingkat inflasi cenderung tinggi dan angka pengangguran cenderung rendah. Sementara itu, apabila salah satu otoritas kebijakan membuat kebijakan pengetatan, sedangkan otoritas yang lain membuat kebijakan pelonggaran atau sebaliknya,

maka tingkat pengangguran dan inflasi cenderung berada pada tingkat sedang.³⁰

8. Studi Terdahulu: Koodinasi Kebijakan Fiskal-Moneter

Simorangkir dalam papernya menuliskan adanya perdebatan hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terkait dengan dampak defisit anggaran yang dapat mengganggu inflasi yang merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. Di mana, bagi pembuat kebijakan fiskal ternyata kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) dan kesempatan kerja, yang merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Oleh karena itu tidak terdapatnya koordinasi di antara kedua kebijakan fiskal-moneter dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi. Simorangkir menyimpulkan bahwa dari hasil analisis empiris dan simulasi teori permainan yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memberikan kerugian output (*output loss*) yang lebih kecil dibandingkan jika kedua kebijakan tersebut tidak berkoordinasi. Jelas disini dapat disimpulkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter penting dalam mengelola ekonomi.³¹

Maryatmo dalam papernya menunjukkan bahwa sedikit atau banyak kebijakan defisit anggaran mempengaruhi suku bunga, kurs, dan tingkat harga (inflasi). Oleh karena itu Maryatmo menyarankan pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan defisit anggarannya, karena kebijakan defisit anggaran bukan tanpa biaya yang bisa membawa dampak ekonomi. Maryatmo juga menemukan bahwa ada hubungan timbal balik antara kebijakan defisit anggaran dan variabel moneter. Kebijakan fiskal mempengaruhi instrumen kebijakan moneter, demikian juga kebijakan moneter mempengaruhi instrumen kebijakan fiskal. Dengan demikian hubungan timbal balik antara instrumen fiskal dan moneter dapat bersifat saling menetralkan dampak ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian independensi Bank Sentral (BI) menuntut koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter yang lebih baik. Sehingga dapat tercapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan yang disertai dengan pengendalian stabilitas moneter.³²

³⁰ Miranda Swaray Goeltom, 2012, Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Tantangan dan Strategi Pemeliharaan Stabilitas Makro dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dalam Sri Adiningsih (Ed), *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 50.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*

²⁹ *Ibid.*

Rahutami menemukan bahwa koordinasi fiskal dan moneter adalah penting karena suku bunga dan uang primer merupakan dua variabel yang harus mendapat perhatian lebih dari Bank Indonesia karena berinteraksi secara kuat dengan anggaran pemerintah. BI harus menjaga independensinya, karena ternyata kebijakan moneter memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggaran pemerintah dan indikator makro yang lain. Dengan demikian ada keterkaitan antara kebijakan fiskal dan moneter, sehingga koordinasi di antara keduanya penting.³³

Kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal tidak dapat berjalan sendiri. Dalam prakteknya, yang sering dijumpai adalah kebijakan fiskal yang juga mempunyai konsekuensi moneter atau kebijakan moneter dengan konsekuensi fiskal (Boediono, 2001). Hal ini digarisbawahi pula oleh Krugman dalam Corsetti dan Mueller (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan lebih efisien bila dibarengi dengan kebijakan moneter yang akomodatif. Dengan kata lain, agar stimulus fiskal dapat berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang konsisten dengan mandat menjaga kestabilan harga. Koordinasi kebijakan ekonomi, antara fiskal dan moneter semakin penting. Namun sejarah menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang baik saja tidaklah cukup, meskipun diperlukan. Kebijakan fiskal yang pruden serta kebijakan moneter bertanggung jawab, yang dibarengi dengan pengawasan dan pengaturan perbankan yang baik, akan membantu terjaganya stabilitas ekonomi makro dan pembangunan ekonomi.³⁴

Terdapat tiga faktor mendasar penyebab terjadinya tidak terkoordinasi antara fiskal-moneter, *Pertama*, otoritas moneter dan fiskal umumnya mempunyai tujuan kebijakan yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena mandat dan konstitusi yang berbeda, ataupun karena pandangan yang berbeda terhadap cara terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, otoritas moneter dan fiskal mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi perekonomian. Sebagai contoh, pemerintah memandang bahwa pemotongan pajak dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan tanpa berdampak buruk terhadap investasi. Sementara itu, otoritas moneter mungkin memandang pemotongan pajak tersebut dapat mengakibatkan peningkatan defisit anggaran sehingga terjadi *crowding out* investasi swasta.

Ketiga, otoritas moneter dan fiskal mempunyai prediksi yang berbeda mengenai kondisi (*state*) perekonomian.³⁵

II. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Moneter untuk Mengendalikan Inflasi

Secara umum, inflasi disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1) pengaruh permintaan (*demand push inflation*); 2) pengaruh ongkos atau biaya (*cost push inflation*). Inflasi yang disebabkan pengaruh permintaan adalah karena kecenderungan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap suatu jenis barang/jasa tertentu sehingga menyebabkan harga barang/jasa yang bersangkutan meningkat. Pengaruh permintaan ini disebabkan oleh kecenderungan mengkonsumsi barang/jasa juga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan (*income*) masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong masyarakat meningkatkan pembelian barang/jasa, baik kebutuhan pokok maupun bukan kebutuhan pokok. Inflasi di Indonesia terjadi terutama pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan harga barang yang ditentukan pemerintah (*administered prices*), seperti harga BBM bersubsidi. Kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok biasanya terjadi saat menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, Tahun Baru serta tahun ajaran baru.³⁶

Sedangkan inflasi yang disebabkan pengaruh biaya atau ongkos adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga barang atau bahan material untuk memproduksi barang-barang jadi. Kenaikan biaya produksi barang ini salah satunya disebabkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Produsen akan mengenakan kenaikan harga BBM tersebut pada biaya produksi agar produsen tetap mendapat keuntungan (*profit*) dari harga jual barang yang diproduksinya (harga pokok penjualan).³⁷

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan *aggregat* (*demand management*) terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (*shocks*) seperti kenaikan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ BPS, *Loc.cit.*, hlm.52.

³⁷ *Ibid.*

harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok *volatile food* dan *administered prices* yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK. Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (*shocks*) yang sangat besar seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM di tahun 2005, 2008 dan 2014 sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi. Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makro-ekonomi yang terintegrasi dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter maupun kebijakan sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (*shocks*) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.³⁸

Inflasi juga dapat disebabkan oleh kenaikan harga impor barang. Artinya harga barang-barang yang diimpor relatif tinggi menyebabkan harga jual barang tersebut di pasar domestik juga akan menjadi mahal. Sebagian besar kenaikan harga barang di pasar dalam negeri disumbang oleh kenaikan harga barang impor baik barang konsumsi maupun barang setengah jadi atau bahan material untuk memproduksi barang jadi yang akan dipasarkan di pasar domestik. Inflasi di Indonesia direncanakan/ditargetkan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal setiap tahun. Tujuannya agar pemerintah menjaga taret tersebut tercapai sepanjang tahun. Inflasi nasional merupakan kumulatif dari angka inflasi di 66 kota di Indonesia. Pemantauan inflasi di 66 kota tersebut dilakukan oleh otoritas moneter bank sentral bersama Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TP2ID).³⁹

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain: 1) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yakni harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas atau barang. 2) Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) yakni menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (dalam negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.⁴⁰

³⁸ Bank Indonesia, Pengenalan Inflasi, Disagregasi Inflasi, *Loc. cit.*
³⁹ *Ibid.*, hlm. 50-51.

⁴⁰ Bank Indonesia, Pengenalan Inflasi, Definisi Inflasi (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/>, diakses 13 Januari 2015 dan 24 Juni 2015).

Tabel 1.
Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Nasional 2011—2013, (persen)

No.	Kelompok Pengeluaran	2011	2012	2013
1.	Umum	3,79	4,30	2,43
2.	Bahan Makanan	0,84	1,31	7,70
3.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,78	1,09	1,33
4.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,78	0,80	1,59
5.	Sandang (Pakaian)	-0,52	0,35	-1,04
6.	Kesehatan	0,18	0,12	1,09
7.	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,35	0,28	0,36
8.	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,34	0,35	-0,01

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2013, BPS Jakarta, hal.50

Tabel 2.
Tingkat Inflasi Nasional, Tahun 2012-2014 dan 2015

Mei 2015	7.15 %
April 2015	6.79 %
Maret 2015	6.38 %
Februari 2015	6.29 %
Januari 2015	6.96 %
Inflasi Tahun 2014	8,36%
Inflasi Tahun 2013	8,38%
Inflasi Tahun 2012	4,30%

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, dalam <http://www.bi.go.id>, diakses tgl. 13 Januari 2015.

Berdasarkan data BPS, mulai 1 Februari 2014, BPS melakukan perubahan perhitungan inflasi nasional dengan penggantian tahun dasar berdasarkan Survei Biaya Hidup tahun 2012 (SBH 2012=100). Perubahan tersebut mempengaruhi pencatatan inflasi dari 66 kota menjadi 84 kota di Indonesia, perubahan jumlah komoditas yang disurvei dari 774 komoditas menjadi 882 komoditas, perubahan komposisi bobot konsumsi kelompok pengeluaran rumahtangga. Pergerakan laju inflasi 2014, misalnya antara lain disebabkan adanya dinamika yang muncul dari rencana lanjutan kebijakan reformasi energy yang telah mendorong peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat.⁴¹

Tekanan inflasi pada tahun 2014 juga disebabkan oleh 1) Dampak beberapa kebijakan harga jual gas LPG 12Kg, 2) Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2014 rata-rata nasional sebesar 17,3%,

⁴¹ Kementerian Keuangan RI, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015, hlm.23.

3) Kenaikan tariff listrik (TDL) pelanggan golongan tariff tertentu, 4) penghapusan secara bertahap subsidi listrik bagi kelompok industri besar dengan daya di atas 200 KVA sejak tanggal 1 Mei 2014.⁴² Kebijakan di atas jelas mempengaruhi terjadinya kenaikan biaya produksi di sektor industri, kenaikan ongkos transportasi dan harga barang. Secara alami, pergerakan inflasi rata-rata tahun 2014 lalu relatif terkendali, kecuali pada bulan Januari, Juni, dan Desember 2014 cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh momen menjelang Hari Raya Idul Fitri 2014, permulaan tahun ajaran baru Juni/Juli 2014, dan Hari Natal 2014, Tahun Baru 2015. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Nopember 2014 lalu, dampaknya dirasakan pada Desember 2014 dengan angka inflasi 8,36%. (lihat Tabel).

Dengan momen di atas, harga barang kebutuhan pokok cenderung semakin meningkat karena kebutuhan masyarakat juga meningkat. Secara logika kenaikan harga barang kebutuhan pokok berdampak langsung pada inflasi. Dalam persaingan sempurna, naiknya harga barang didasarkan pada mekanisme pasar dan sulit dikendalikan oleh campur tangan pemerintah dan otoritas moneter bank sentral, karena harga ditentukan *supply dan demand*, kecuali harga jenis barang tertentu yang ditentukan pemerintah seperti harga BBM bersubsidi, harga pupuk bersubsidi, dan lain-lain.

Pengaruh permintaan terhadap inflasi pada dasarnya simetris dengan semakin meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat, khususnya M1. Artinya peningkatan permintaan terhadap barang/jasa yang menyebabkan inflasi adalah juga dipengaruhi dan menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar (M1) di masyarakat. Transaksi jual-beli umumnya mempergunakan jenis uang M1 (uang logam, uang kertas, dan uang giral). Pengaruh permintaan terhadap inflasi adalah hal yang wajar dalam perekonomian karena bekerjanya mekanisme pasar. Inilah yang dinamakan terjadi korelasi positif antara jumlah uang beredar dengan inflasi. Tidak mungkin terjadi inflasi yang tinggi jika jumlah uang beredar khususnya M1 di masyarakat semakin sedikit.

Sebagai gambaran, pada Triwulan II/2012, jumlah uang kartal yang beredar bulan Mei 2012 meningkat sebesar 1,34% dari April 2012 sebesar Rp290,86 triliun. Konsumsi rumah tangga menghadapi tahun ajaran baru (Juni/Juli) berpengaruh terhadap peningkatan peredaran uang kartal di akhir Triwulan II/2012 di mana bulan Juni 2012 uang kartal naik sebesar 6,75% menjadi Rp314,67 triliun. Kemudian di Triwulan III/2012 naik sebesar 3,70% dari sebelumnya

mencapai Rp327,06 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2012.⁴³

Perkembangan inflasi sepanjang 2014 sebesar 8,36% lalu adalah terkait erat dengan perkembangan harga beberapa komoditas, seperti pangan dan kebijakan penetapan harga komoditas tertentu oleh pemerintah seperti harga BBM, tarif dasar listrik (TDL), harga LPG tabung 12 Kg. Kontribusi kebijakan harga diatur pemerintah mencapai 17,57% terhadap inflasi nasional 8,36%. Laju inflasi 2014 terkait kenaikan komponen harga energi merupakan implikasi tidak langsung dari kebijakan reformasi energi oleh pemerintah yang telah dilaksanakan sejak 2013. Padahal target inflasi pada APBN—Perubahan Tahun Anggaran 2014 ditetapkan 5,30%. Artinya pertumbuhan inflasi naik 57,73% dari target.⁴⁴ Sedangkan laju inflasi berdasarkan komponen *volatile foods* mencapai angka 10,88% tahun 2014. Inflasi komponen *volatile foods* dan *administered prices* merupakan dua faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan laju inflasi setiap tahun. Sedangkan laju inflasi komponen inti (*core inflation*) relatif rendah sebesar 4,93% tahun 2014.

Di sisi lain, bank sentral menetapkan kebijakan BI-Rate rata-rata tahun 2014 relatif stabil 7,50%. Sejak 18 November 2014, bank sentral menaikkan BI-Rate menjadi 7,75% dan Februari 2015 lalu turun menjadi 7.50%. Sebagai gambaran, BI-Rate tertinggi terjadi pada Desember 2005—April 2006 sebesar 12,75%.⁴⁵ Kebijakan bank sentral menaikkan BI-Rate bertujuan untuk meredam inflasi dengan menaikkan suku bunga dasar. Dengan menaikkan BI-Rate diharapkan masyarakat akan cenderung mengalihkan uangnya untuk disimpan di bank. Tahun 2015, laju inflasi diperkirakan masih tertekan sebagai dampak dari kebijakan harga pada 2014 di samping pengaruh gejolak kurs rupiah. Melalui sinergi kebijakan dan koordinasi pengendalian inflasi di pusat dan daerah diharapkan inflasi 2015 dapat dijaga pada level 5,0% sesuai APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015.⁴⁶

Di tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Ke depan, koordinasi kelembagaan antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif

⁴³ BPS, *Loc.cit.* hlm.80.

⁴⁴ Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan dan RAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015.

⁴⁵ "Risiko Inflasi Masih Mengintai", *Harian Bisnis Indonesia*, 3 Maret 2015

⁴⁶ Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan dan RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.

⁴² *Ibid.*

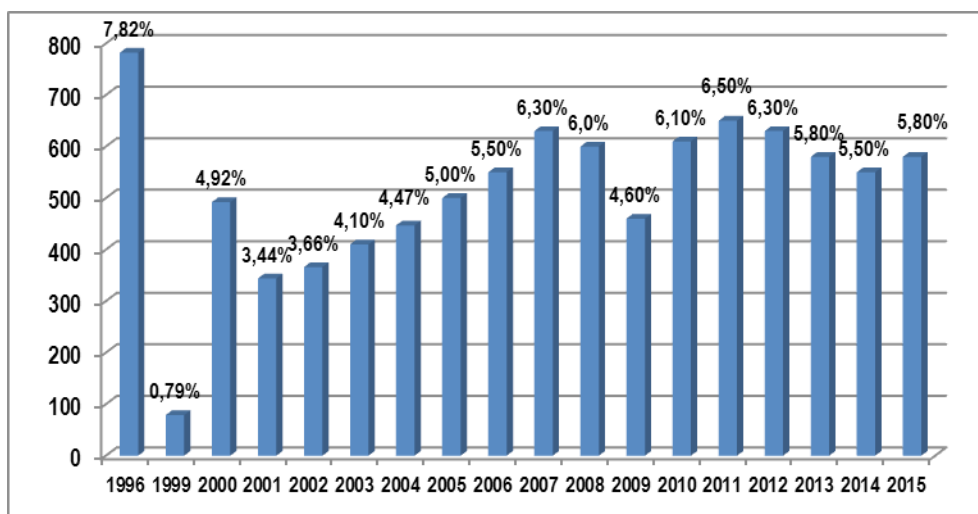
dengan dukungan forum TPI, baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil (*non-inflationary*), yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.⁴⁷

B. Kebijakan Fiskal untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi pengeluaran, factor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni (1) Konsumsi masyarakat, (2) Investasi swasta, (3) Pengeluaran pemerintah, (4) Ekspor/impor. Apabila sebagian besar faktor-faktor di atas mengalami perubahan negatif, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi turun/rendah, misalnya kontribusi pengeluaran pemerintah yang sangat kecil juga akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

keseluruhan belanja pemerintah pusat terhadap PDB maka kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) bertambah besar. Pada tahun 2013 misalnya, kontribusi belanja pemerintah pusat 12,5% terhadap PDB. Tahun 2014, diperkirakan mencapai 11,9%.⁴⁹

Dalam menyikapi kebijakan fiskal yang ekspansif ke depan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam 6 tahun terakhir, yakni kebijakan stimulus fiskal untuk menjaga laju pertumbuhan konsumsi pemerintah di atas 4,0%, mencegah PHK dan meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi menghadapi krisis ekonomi dunia, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat juga harus



Sumber: BPS dan APBN Tahun Anggaran 2000 s/d 2015

Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia Tahun 1996, 1999—2015, (%).

Ruang fiskal untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (PDB) umumnya dilakukan melalui pengeluaran pemerintah (*government spending*) dalam anggaran Negara. Selama bertahun-tahun kontribusi pengeluaran pemerintah rata-rata di bawah 10% terhadap PDB dan yang paling rendah dibandingkan kontribusi konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan ekspor/impor. Tahun 2009 dan 2010, misalnya kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) masing-masing 9,6% dan 9,1%. Pada tahun 2011 sebesar 9,02%; tahun 2012 sebesar 8,91%; tahun 2013 sebesar 9,11%; dan tahun 2014 diperkirakan sebesar 8,04%. Pengeluaran pemerintah yang dihitung adalah belanja barang, belanja pegawai, penyusutan, dan penerimaan barang dan jasa.⁴⁸ Apabila dihitung

lebih efisien, efektif dan tepat sasaran mengingat terbatasnya sumber-sumber keuangan Negara. Pemerintah pusat juga harus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja karena sebagian besar porsi belanja pemerintah pusat bersifat *mandatory spending* sehingga mengakibatkan ruang fiskal untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi cenderung kecil. Rasio belanja pemerintah pusat yang bersifat mengikat terhadap total belanja periode 2005 - 2010, misalnya, rata-rata mencapai 74,30% dan sisanya belanja yang bersifat *discretionary* hanya sebesar 25,70%.⁵⁰

Kebijakan defisit anggaran merupakan pilihan kebijakan yang paling baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Semakin besar defisit anggaran yang ditandai dengan jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan, maka diharapkan target pertumbuhan ekonomi tercapai. Namun

⁴⁷ Bank Indonesia, Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/moneter/koordinasi-kebijakan/Contents/Default.aspx>., diakses 4 Maret 2015).

⁴⁸ Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014 dan <http://www.bps.go.id>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2011, hal. IV-1 s/d IV-7.

sebaiknya sumber pembiayaan defisit anggaran dalam kebijakan fiskal berasal dari dalam negeri, karena risiko fiskal lebih kecil—seperti risiko nilai tukar rupiah yang cenderung terdepresiasi dengan sumber pembiayaan dari pinjaman LN. Sampai saat ini sumber pembiayaan deficit anggaran sebagian berasal dari pinjaman LN. Struktur anggaran deficit merupakan ciri dari kebijakan fiskal yang ekspansif. Berbeda dengan kebijakan fiskal yang kontraktif di mana pengeluaran pemerintah ditekan serendah mungkin sehingga akan melahirkan struktur anggaran yang surplus.

Anggaran defisit tetap dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi namun sangat bergantung kepada besar—kecilnya pendapatan negara. Semakin besar pendapatan Negara maka kecenderungan semakin besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab kebijakan fiskal ekspansif dengan deficit anggaran akan menambah jumlah peredaran uang guna mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan dari sisi keuangan publik.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan maksimum defisit anggaran sebesar 2,5% dari PDB. Sejak tahun anggaran 2008 sampai 2014, deficit anggaran selalu di atas 2%. Bahkan deficit anggaran tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2009 sebesar 2,4% dari PDB.⁵¹ Defisit anggaran tahun 2014 ditetapkan sebesar 1,69% dari PDB lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 2,38% dari PDB.⁵² Kebijakan defisit anggaran ini adalah dalam rangka memberikan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui program dan kegiatan pemerintah.⁵³

Untuk mengetahui kebijakan fiskal ekspansif salah satunya adalah adanya peningkatan belanja pemerintah pusat dalam anggaran Negara. Sejak tahun anggaran 2010 sampai 2014, belanja pemerintah pusat cenderung meningkat. Pada tahun anggaran 2010 realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp607,4 triliun meningkat dari tahun anggaran 2009. Tahun 2012 belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp1.010,6 triliun dan tahun

anggaran 2013 mencapai angka Rp1.154,4 triliun. Ini artinya kebijakan fiskal ekspansif sejak 2009 sampai 2013 berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun anggaran 2014 lalu, belanja pemerintah pusat dalam APBN-Perubahan ditetapkan sebesar Rp1.280,4 triliun, tetapi realisasinya mencapai sebesar Rp1.190,8 triliun.⁵⁴ Belanja pemerintah pusat tersebut di atas rata-rata setiap tahun didominasi belanja berdasarkan fungsi pelayanan umum (*public service*); fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan.⁵⁵

Ketika pendapatan Negara terutama dari pajak sangat terbatas, maka dampaknya kebijakan fiskal untuk ekspansif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi relatif kecil. Belanja pemerintah ke depan sebaiknya adalah belanja modal yang dapat lebih nyata meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja subsidi terutama subsidi energi, misalnya, kurang mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi pilihan kebijakan fiskal ini sangat politis namun tidak signifikan mendukung pertumbuhan. Di bawah ini dapat dilihat keseluruhan struktur belanja Negara dalam anggaran negara.

Belanja pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mencapai tujuan nasional yakni *pertama*, besaran dan komposisi belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal memiliki dampak signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional. *Kedua*, berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Oleh karena itu, kualitas kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat menempati posisi yang sangat strategis dalam mencapai tujuan-tujuan nasional. Kualitas kebijakan dan alokasi yang representatif juga mendorong persepsi positif dari pasar pengambil keputusan bisnis yang berarti dapat berdampak positif terhadap perekonomian.⁵⁶

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat (5) diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan menurut fungsi yang saat ini terdiri dari sebelas fungsi. Sedangkan menurut jenis terdiri dari delapan jenis belanja.⁵⁷

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 kontribusi belanja pemerintah pusat terhadap PDB sangat tinggi dan meningkat dari tahun 2007.

⁵¹ *Ibid.*, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2014, hal.6-2 dan 6-3.

⁵² Sri Mas Sari, 2013, Defisit Anggaran 2014 Disepakati Rp.175,35 Triliun, (*online*), (<http://finansial.bisnis.com/read/20131024/10/182748/defisit-anggaran-2014-disepakati-rp17535-triliun>, diakses 30 Januari 2015) dan Anna Suci Perwitasari & Margareta Engge Kharismawati, 2013, Pemerintah Menaikkan defisit Anggaran di APBN 2014, (*online*), (<http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-menaikkan-defisit-anggaran-di-apbn-2014>, diakses 30 Januari 2015).

⁵³ Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan..., *Loc.cit.*, hlm.6-2.

⁵⁴ Tahun 2014, Belanja Negara Terealisasi 94 Persen dari Pagu, (*online*), (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/tahun-2014-belanja-negara-teralisasi-94-persen-dari-pagu>, diakses 30 Januari 2015).

⁵⁵ Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan..., *Loc.cit.*, hlm. 4-8.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 4-1.

⁵⁷ Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2013, hlm.4-41.

Seperti diketahui pada tahun 2008 terjadi krisis produksi dan daya saing perekonomian domestik ekonomi dunia terutama di sebagian Negara-negara menuju percepatan dan perluasan pertumbuhan

Tabel 4. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat APBN dan Kontribusinya Terhadap PDB Tahun Anggaran 2008—2014, (RpTriliun)

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)
Belanja Pem. Pusat	504,6	693,4	628,8	697,4	883,7	1.010,6	1.196,8	1.280,4
% Terhadap PDB	12,8%	14,0%	11,2%	10,8%	11,9%	12,5%	12,5%	11,9%
Defisit Anggaran (%) PDB	-	0,08%	1,58%	0,73%	1,14%	1,86%	2,38%	1,49%

Keterangan :*)APBN Tahun Anggaran 2014.

Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

anggota Uni Eropa (*European Union*) dan AS yang berdampak pada sektor swasta di Indonesia. Peran fiskal pemerintah melalui belanja pemerintah pusat sangat membantu memulihkan perekonomian domestik yang sempat lesu sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia tersebut. Tetapi pada tahun 2009 anggaran belanja pemerintah pusat turun dan berdampak pada penurunan kontribusinya terhadap PDB menjadi 11,2% sampai tahun 2010.

Mencermati perkembangan ekonomi global dan domestic tahun 2015, tantangan kebijakan fiskal antara lain: 1) risiko gejolak perekonomian global dan dampak perlambatan ekonomi Tiongkok; 2) potensi gejolak likuiditas global; 3) gejolak harga komoditas di pasar global khususnya harga komoditas pangan; 4) tekanan defisit neraca transaksi berjalan; 4) percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif; 5) ketergantungan terhadap impor barang modal; 6) ketahanan energi dan pangan; 7) tekanan defisit APBN karena terkendalanya pencapaian target penerimaan Negara dan meningkatnya beban subsidi energi; 8) peningkatan kualitas dan percepatan penyerapan belanja APBN. Kebijakan fiskal tahun 2015 masih tetap ekspansif dengan deficit anggaran.⁵⁸

Kebijakan fiskal ekspansif tahun 2015 akan didorong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% dengan target inflasi 5,0% dan target deficit anggaran 2,21%. Untuk mencapai target kebijakan fiskal di atas, salah satu strategi kebijakan Belanja Negara tahun 2015 yakni memberikan stimulasi terhadap perekonomian melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.⁵⁹

Sedangkan kebijakan Belanja Modal tahun anggaran 2015 diarahkan untuk penguatan kapasitas

ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Di samping itu, kebijakan Belanja Modal diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, perumahan, konektivitas nasional, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.⁶⁰

Kebijakan fiskal ekspansif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan belanja pemerintah pusat, sangat bergantung kepada pendapatan Negara, khususnya pendapatan pajak (*tax policy*). Semakin besar penerimaan pajak semakin besar kecenderungan anggaran Negara untuk ekspansif. Sedangkan penerimaan perpajakan sangat bergantung kepada pertumbuhan sektor riil seperti pertumbuhan di sektor industri, sektor perdagangan termasuk ekspor—impor, dan sektor UMKM. Oleh karena itu perlu didorong ketiga sektor di atas karena merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi selain melalui kebijakan fiskal pemerintah. Upaya peningkatkan *tax ratio* dan *coverage tax ratio*⁶¹ merupakan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendorong ekspansi fiskal.

Apabila dianalisa pertumbuhan belanja pemerintah pusat dalam kebijakan fiskal ekspansif, maka periode 2007—2013, pertumbuhan belanja pemerintah pusat rata-rata setiap tahun sebesar 22,38% (lihat tabel 4). Ini menunjukkan bahwa ekspansi fiskal sangat *urgent* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

⁶¹ Tax ratio menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional atau produk domestik bruto. Artinya, rasio ini merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan. Sedangkan tax coverage ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut. Tax coverage ratio merupakan indikator untuk menilai ngkat keberhasilan pemungutan pajak.

⁵⁸ Kementerian Keuangan RI, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015, hlm. 93-94.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.101.

Kontribusinya terhadap PDB juga konsisten rata-rata di atas 10% setiap tahun sejak tahun 2007 sampai tahun 2013. Walaupun pemerintah mendorong fiskal untuk ekspansif tetapi tingkat inflasi relatif terjaga dan masih di bawah 10% rata-rata setiap tahun sejak tahun 2007 sampai 2013, kecuali angka inflasi yang naik drastis pada tahun 2008 sebesar 11,1%.⁶² Inflasi yang tinggi pada tahun 2008 bukan disebabkan oleh kenaikan belanja fiskal pemerintah pusat dalam anggaran Negara melainkan antara lain disebabkan oleh faktor kenaikan harga BBM dari Rp4.500,- per liter menjadi Rp6.000,- per liter, dan kecenderungan kenaikan konsumsi masyarakat. Ini artinya kebijakan fiskal ekspansif tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi walaupun ekspansi fiskal cenderung akan menambah peredaran uang di masyarakat terutama karena peningkatan belanja pemerintah pusat.

Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perencanaan anggaran pemerintah pusat dalam anggaran Negara diarahkan untuk mencapai sepuluh sasaran strategis guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan lima tahun ke depan yakni 1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi; 2) menurunnya pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik; 3) menurunnya angka kemiskinan; 4) meningkatnya pendapatan per kapita; 5) stabilitas ekonomi yang semakin terjaga; 6) pembiayaan dari dalam negeri yang semakin kuat dan meningkat; 7) meningkatnya ketahanan pangan; 8) meningkatnya ketahanan energy; 9) meningkatnya daya saing ekonomi dan 10) diperkuatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan “*green economy*”.⁶³

peka terhadap tekanan inflasi yang tinggi tersebut karena sudah melebihi dua digit yang cenderung mengkhawatirkan terhadap perekonomian. Idealnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya diikuti dengan pengendalian inflasi yang relatif rendah. Di sinilah pentingnya koordinasi kebijakan moneter-fiskal. Pada tahun 2009, laju inflasi sangat rendah sebesar 2,8% dan pertumbuhan ekonomi turun ke angka 4,6%. Kemudian pada tahun 2010 laju inflasi meningkat menjadi 7,0% dan pertumbuhan ekonomi juga naik mencapai 6,2%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak selamanya dan tidak harus parallel dengan naiknya inflasi sebagaimana terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2012. (lihat tabel 5). Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dan tahun 2014 turun, tetapi laju inflasi justru meningkat di atas 8%. Seharusnya efek kebijakan moneter bank sentral dapat meredam laju inflasi walaupun pertumbuhan ekonomi turun. tetapi pengendalian inflasi tidak sepenuhnya berhasil di tahun 2013 dan tahun 2014 dengan angka inflasi cukup relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya bauran kebijakan moneter—fiskal yang saling mendukung. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru dibutuhkan tambahan modal yang besar termasuk dari sisi belanja pemerintah pusat dalam anggaran Negara.

Dalam tahun anggaran 2015, kebijakan fiskal tetap ekspansif dengan defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,9% dari PDB. Dengan deficit anggaran sebesar 1,9%, proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,7% dan target inflasi sebesar 5,0%. Kebijakan subsidi tetap (*fixed subsidy*) tahun 2015 diproyeksikan akan membantu pertumbuhan

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi (PDB) dan Tingkat Inflasi Tahun 2007—2015 (%)

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
Pertumbuhan Ekonomi (PDB)	6,3	6,0	4,6	6,2	6,5	6,3	5,8	5,10	5,7
Inflasi	6,6	11,1	2,8	7,0	3,8	4,3	8,4	8,36	5,0

Keterangan: *)Proyeksi APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Sumber: Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014; APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, dan Perkembangan Ekonomi Makro Dan Realisasi APBNP Tahun 2014, dalam <http://www.kemenkeu.go.id>.

Pada saat inflasi tahun 2008 sebesar 11,1% pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0%. Ini artinya kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 walaupun inflasi relatif tinggi. Sisi kebijakan fiskal sangat berkepentingan terhadap kebijakan pengendalian inflasi dari sisi moneter, *namun otoritas moneter harus*

ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,7% tersebut dengan re-alokasi dana subsidi BBM dan program penghematan belanja pemerintah yang kurang produktif kepada belanja pemerintah yang lebih produktif seperti untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada tahun 2014, pertumbuhan belanja pemerintah diprediksi sebesar 2,4%; pertumbuhan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga

⁶² Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2013, Lampiran.

⁶³ *Ibid.*, Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 201, hlm. IV-1.

mencapai 6,9% dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,2%.⁶⁴

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun anggaran 2015 sebesar 5,7%, kebijakan fiskal belanja pemerintah sangat strategis, terutama belanja pemerintah berdasarkan fungsi ekonomi. Belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi ekonomi tahun anggaran 2015 meningkat sebesar 5,8% dibandingkan tahun anggaran 2014. Kenaikan fiskal belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi ekonomi ini dikarenakan adanya penajaman dan penguatan program yang menjadi prioritas pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur konektivitas/transportasi, kemaritiman, energi, dan infrastruktur ketenagalistrikan. Pada tahun anggaran 2014, belanja fiskal pemerintah pusat berdasarkan fungsi ekonomi menempati urutan kedua terbesar setelah belanja berdasarkan fungsi pelayanan umum (*public service*). Secara total belanja pemerintah pusat tahun 2015 mencapai Rp1.330,766 triliun, meningkat dibandingkan tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.280,368 triliun.⁶⁵ Kebijakan fiskal ekspansif ini harus didukung pula dengan pengendalian inflasi oleh otoritas moneter Bank Sentral.

Pada saat kebijakan fiskal ekspansif tahun anggaran 2014 bertujuan mendorong pertumbuhan di tahun 2014 sebesar 5,10%, kebijakan moneter menghasilkan angka inflasi sebesar 8,36%. Ini artinya kebijakan fiskal-moneter kurang terkoordinasi. Otoritas fiskal merencanakan ekspansi anggaran yang defisit, dampaknya jumlah uang beredar cenderung bertambah. Tetapi tidak diimbangi dengan stabilitas inflasi karena supply barang/jasa belum terkelola dengan baik sehingga menyebabkan harga barang/jasa untuk mendorong pertumbuhan menjadi meningkat. Inflasi yang tinggi juga tidak semata mata kesalahan kebijakan moneter, tetapi dapat mempengaruhinya. Demikian juga pertumbuhan ekonomi yang rendah juga tidak semata-mata disebabkan kebijakan fiskal namun kebijakan moneter juga mempengaruhinya. Caranya dengan strategi moneter BI untuk menurunkan inflasi yang rendah sepanjang tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi yang positif dengan inflasi rendah merupakan tujuan dan target yang paling ideal dari koordinasi kebijakan fiskal-moneter ke depan.

Inflasi yang tinggi, walau pertumbuhan ekonomi positif tetap tidak baik. Gambaran ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kurang mendorong peningkatan kesejahteraan karena

inflasi yang tinggi ternyata kurang kondusif untuk mengurangi kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi disertai dengan inflasi yang tinggi. Hal ini jelas mengindikasikan kurang terkoordinasinya kebijakan fiskal-moneter.

Tidak terdapatnya koordinasi di antara kebijakan fiskal-moneter dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi. Artinya koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memberikan kerugian output (*output loss*) yang lebih kecil dibandingkan jika kedua kebijakan tersebut tidak berkoordinasi. Jelas di sini dapat disimpulkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal-moneter penting dalam mengelola ekonomi. Praktek selama ini kurang koodinasi antara fiskal-moneter, karena fiskal tetap ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak melihat sisi moneter yakni inflasi yang fluktuatif. Dampak inflasi yang tinggi antara lain inefisiensi ekonomi atau ekonomi biaya tinggi. Efeknya pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas, apalagi pertumbuhan ekonomi minus.

Kebijakan fiskal ekspansif cenderung mendorong pertumbuhan uang beredar, tetapi bukan satu satunya penyebab tingginya inflasi, karena persoalan inflasi yang disebabkan aspek supply yang tidak baik, bukan menjadi otoritas moneter, tetapi merupakan domain otoritas fiskal dan ekonomi makro. Ekspansi moneter yang terkelola dapat mendukung pertumbuhan dengan meningkatnya modal investasi dari lembaga perbankan. Di sini koordinasi sangat baik, oleh karena itu inflasi perlu dikelola melalui kebijakan fiskal-moneter agar pertumbuhan positif berkualitas. Kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi meliputi 1) kebijakan tarif, 2) kebijakan perpajakan, 3) kebijakan subsidi energi dan non-energi, dan 4) alokasi belanja lainnya.

Mengingat interaksi/koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menghasilkan kerugian ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan tanpa interaksi kebijakan moneter dan fiskal, serta interaksi kebijakan moneter dan fiskal belum optimal berdasarkan kombinasi parameter yang ada seperti suku bunga, jumlah uang beredar, dan lainlain, maka penting meningkatkan bauran kebijakan moneter fiscal secara bersamaan. Misalnya, bauran kebijakan suku bunga dengan kebijakaan pajak dalam rangka mncapai *output*/pertumbuhan ekonomi yang optimal, kebijakan nilai tukar rupiah dengan kebijakan perdagangan dalam mendorong ekspor-impor, kebijakan perbankan dengan kebijakan sektor pertanian dalam rangka stabilisasi harga barang, dan peningkatan kapasitas ekonomi, kombinasi kebijakan suku bunga dengan kebijakan pengeluaran pemerintah (APBN) dalam rangka mendorong

⁶⁴ *Ibid.*, Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, hlm. 2-5.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.5-2.

output/pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi harga. Adanya bauran kebijakan moneter dan fiskal disertai pengutan kelembagan, (TPI, BI dan Otoritas Fiskal) diharapkan dapat meningkatkan output dan stabilisasi harga yang lebih optimal dalam rangka memerangi kemiskinan. Diakui interaksi/koodinasi kebijakan moneter-fiskal penting dalam menghadapi guncangan inflasi dibandingkan terhadap guncangan output/pertumbuhan ekonomi. Maka koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk memerangi tekanan inflasi dari sisi penawaran (*supply*), perlu ditingkatkan.

Penelitian interaksi/koordinasi kebijakan moneter-fiskal di Indonesia masih relatif terbatas. Adam dan Billi (2005), menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal dengan bias pengeluaran pemerintah dan kebijakan moneter dengan bias inflasi akan menyebabkan kerugian sosial yang sangat berarti. Javet dan Sahinoz (2005), menyatakan bahwa target keseimbangan internal dan eksternal dapat dicapai dengan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter hendaknya memperhatikan pertumbuhan ekonomi mengingat besarnya kerugian sosial yang diderita perekonomian nasional jika bank sentral hanya memperhatikan inflasi. Muscatelli (2004), misalnya, menyimpulkan bahwa interaksi kebijakan moneter dan fiskal akan bergerak searah atau berlawanan sangat dipengaruhi oleh sifat guncangan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya, respon kebijakan moneter yang optimal akan dipengaruhi oleh beberapa skenario guncangan pada kebijakan fiskal dan dampak yang timbul dari interaksi/koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terhadap kesejahteraan sosial akan positif.⁶⁶

Dalam hal pengendalian inflasi, koordinasi BI dengan Pemerintah masih dapat ditingkatkan terutama untuk menekan supply constraint dan membawa ekspektasi masyarakat terhadap inflasi masih adaptif ke arah forward. Dalam lingkup yang lebih luas yaitu kebijakan ekonomi makro, maka koodinasi kebijakan ekonomi makro lebih ditekankan kepada pengelolaan demand management, secara menyeluruh antara fiskal dan moneter untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang disepakati.⁶⁷

Dalam kondisi krisis keuangan/ekonomi, kombinasi kebijakan ekspansi fiskal dan ekspansi moneter sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena munculnya sinergi di antara keduanya, sehingga ekspansi fiskal yang berpotensi meningkatkan suku bunga

dinetralsir dengan penurunan suku bunga melalui kebijakan moneter. Bauran kebijakan fiskal-moneter tersebut lebih efektif dibandingkan apabila hanya dilakukan kebijakan ekspansi fiskal saja atau hanya dilakukan kebijakan ekspansi moneter saja. Kombinasi kebijakan ekspansi fiskal dan moneter memiliki dampak multiplier yang besar, dan mampu mendorong permintaan agregat. Sementara itu secara sektoral, menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif ternyata meningkatkan produksi di hampir semua sektor ekonomi. Hal ini terjadi karena insentif fiskal (seperti penurunan pajak, penurunan bea masuk (BM) impor, dan lainnya) mendorong dunia usaha meningkatkan investasi. Demikian juga, kenaikan permintaan agregat juga mendorong pengusaha/pelaku ekonomi untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi peningkatan permintaan barang/jasa.

III. KESIMPULAN

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam kaitan dengan pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun permasalahan inflasi merupakan wewenang dan tugas dari bank sentral melalui kebijakan moneter untuk mengendalikan dan mencapainya, tetapi pemerintah melalui kebijakan fiskal sangat berkepentingan karena inflasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap keseluruhan kebijakan fiskal, baik pendapatan Negara maupun belanja Negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga terkait dan berpengaruh terhadap upaya pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal dalam anggaran Negara seperti kenaikan harga energi BBM bersubsidi, dan tarif dasar listrik yang merupakan *administered prices*, misalnya, sangat mempengaruhi perkembangan inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi tetap harus terkoordinasi dan bersinergi dengan implementasi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang kontraktif merupakan bauran kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mampu meredam kondisi perekonomian yang memanas. Serta guncangan ekonomi. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan moneter harus tetap memperhatikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi (PDB) yang direncanakan dalam kebijakan fiskal. Kebijakan moneter tidak dapat berdiri sendiri dalam kaitan dengan pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlu bauran kebijakan fiskal—moneter agar target inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara bersamaan.

⁶⁶ Wijoyo Santoso, 2012, Interaksi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia, dalam Sri Adiningsih (Ed), *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 229.

⁶⁷ Bambang Prijambodo, *Loc. cit.*

Secara umum, inflasi yang tinggi walaupun pertumbuhan ekonomi juga tinggi mencerminkan suatu keadaan perekonomian yang “memanas” (*over-heating economy*). Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingginya inflasi tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, karena inflasi yang tinggi akan berpengaruh negative terhadap penurunan tingkat daya beli masyarakat (*purchasing power*). Inflasi yang tinggi merupakan hambatan atau resisten terhadap perekonomian. Padahal setiap tahun perekonomian harus tumbuh positif, agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.

Kondisi perekonomian yang relatif stabil dan baik adalah jika pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil dari tahun ke tahun (*yoy*). Oleh sebab itu, bauran kebijakan moneter—fiskal dengan koordinasi yang baik sangat penting dan perlu dalam suatu perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan. Tetapi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah yang berkualitas dengan program pembangunan yang lebih produktif, seperti belanja untuk proyek pembangunan infrastruktur. Kebijakan fiskal untuk pembangunan infrastruktur secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat, baik miskin maupun kaya.

Kebijakan fiskal yang ekspansif harus didukung dengan kebijakan moneter yang kontraktif untuk mencapai target inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara bersamaan. Kebijakan fiskal yang ekspansif merupakan *outcome* kebijakan anggaran yang defisit untuk mencapai target pertumbuhan. Dari aspek moneter, kebijakan moneter yang kontraktif juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan. Pengendalian jumlah uang beredar (M0, M1 dan M2) secara langsung akan bertujuan meredam gejala inflasi tetapi secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter kontraktif tidak harus dalam bentuk *tight money policy*, namun dengan berbagai instrumen moneter yang diterapkan Bank Indonesia dapat menjaga tingkat inflasi yang diharapkan (*inflation targeting*) dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor swasta.

Bauran kebijakan moneter—fiskal dalam menjaga tingkat inflasi yang relatif rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan utama dalam perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan gambaran apakah perekonomian Indonesia berkembang atau tidak serta stabil atau tidak. Inflasi yang sangat tinggi sangat tidak baik dan menggambarkan suatu keadaan perekonomian

yang dilanda krisis. Inflasi yang tinggi juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi. Solusinya adalah koodinasi dan sinergi antara kebijakan moneter dengan fiskal secara bersamaan. Kebijakan moneter—fiskal tidak saling meniadakan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Nasution, Mulia. (1998). *Ekonomi Moneter: Uang dan Bank*. Jakarta: Djambatan.
- Warjiyo, Perry & Solikin. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: BI.
- Pujoalwanto, Basuki. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Cetakan Pertama. Jakarta: Graha Ilmu.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

- Goeltom, Miranda Swaray. (2012). Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Tantangan dan Strategi Pemeliharaan Stabilitas Makro dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dalam Sri Adiningsih (Ed), *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan* Yogyakarta: Kanisius
- Santoso, Wijoyo. (2012). Interaksi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia, dalam Sri Adiningsih (Ed), *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan* Yogyakarta: Kanisius.

Buku terjemahan:

- Mishkin, Frederic S. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan* Buku 1 Edisi 8, terjemahan oleh Lana Soelistianingsih & Beta Yulianita G. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. *Makroekonomi* Edisi Keenam, terjemahan oleh Fitria Liza & Imam Nurmawan Jakarta: Erlangga, 2007.

Tulisan/ Berita dalam surat kabar:

- Risiko Inflasi Masih Mengintai, *Harian Bisnis Indonesia*, 3 Maret 2015.

Dokumen resmi:

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: BPS.

_____. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: BPS.

_____. *Statistik Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: BPS.

_____. *Statistik Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: BPS.

_____. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Maret 2015. Jakarta: BPS.

Kementerian Keuangan RI. *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2009*.

_____. *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2010*.

_____. *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2011*.

_____. *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2012*.

_____. *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2013*.

_____. *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014*.

_____. *Nota Keuangan dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2013*.

_____. *Nota Keuangan dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2014*.

_____. *Nota Keuangan dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015*.

_____. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015*.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Prijambodo, Bambang. "Evaluasi Implementasi Langkah-Langkah Penguatan Kebijakan Moneter Dengan Sasaran Akhir Kestabilan Harga", makalah disampaikan pada *Round Table Discussion* tentang Evaluasi Implementasi *Inflation Targeting Framework*, Bank Indonesia, Jakarta, 28 Juni 2006.

Internet:

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx>, diakses 7 Januari 2015).

Bank Indonesia, Pengenalan Inflasi, Pentingnya Kestabilan Harga, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Pentingnya.aspx>, diakses 17 Februari 2015).

_____, Pengenalan Inflasi, Disagregasi Inflasi, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Disagregasi.aspx>, diakses 17 Februari 2015).

_____, Pengenalan Inflasi, Definisi Inflasi (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/>, diakses 13 Januari 2015 dan 24 Juni 2015).

_____, Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/moneter/koordinasi-kebijakan/Contents/Default.aspx>, diakses 4 Maret 2015).

Adiningsih, Sri (Ed), 2012, *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan*, Cetakan I, Yogyakarta: Kanisius, hlm.50, (*online*), (<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Documents/96bbcb9456741959ff53fee701f6168koordinasifiskalmoneter1.pdf>, diakses 24 Juni 2015).

Sari, Sri Mas. (2013). Defisit Anggaran 2014 Disepakati Rp.175,35 Triliun, (*online*), (<http://finansial.bisnis.com/read/20131024/10/182748/defisit-anggaran-2014-disepakati-rp17535-triliun>, diakses 30 Januari 2015)

Anna Suci Perwitasari & Margareta Engge Kharismawati, 2013, Pemerintah Menaikkan defisit Anggaran di APBN 2014, (*online*), (<http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-menaikkan-defisit-anggaran-di-apbn-2014>, diakses 30 Januari 2015).

Tahun 2014, Belanja Negara Terealisasi 94 Persen dari Pagu, (*online*), (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/tahun-2014-belanja-negara-teralisasi-94-persen-dari-pagu>, diakses 30 Januari 2015)